Vol. 5 No. 4 (2026) - November, pp 3667-3675 https://doi.org/10.59025/3er5cx81

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Pendampingan Transformasi Digital Sistem Pengambilan Keputusan Prioritisasi Potensi Investasi pada DPMPTSP Kabupaten Banyuasin

Malahayati[1], Wanda Septian[1], Desi Apriyanty[1], Nita Novita[4], Afdilia Nasya[1], Chelsea Choirunnisah[1], Lenno Nardo[1]

[1]*Politeknik Negeri Sriwijaya*

INFO ARTIKEL

Diserahkan: 02/09/2026
Direvisi: 28/09/2026
Diterima: 27/10/2026
Diterbitkan: 08/11/2026

***Kata Kunci*:**

Transformasi Digital,
Sistem Pengambilan Keputusan,
Prioritas Investasi,
Pendampingan Teknologi

ABSTRAK

Transformasi digital pada pelayanan investasi memerlukan dukungan sistem informasi yang mampu membantu mitra dalam mengolah informasi dan menentukan prioritas potensi investasi secara lebih terstruktur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuasin dalam memahami manfaat dan penggunaan sistem pengambilan keputusan untuk prioritisasi potensi investasi yang merupakan hasil dari penelitian sebelumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui metode workshop dan pendampingan yang meliputi penyampaian materi, demonstrasi sistem, praktik penggunaan, serta evaluasi pemahaman peserta menggunakan pre-test dan post-test. Peserta kegiatan berjumlah 8 orang yang merupakan perwakilan mitra. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan, yang ditunjukkan melalui meningkatnya proporsi peserta pada kategori paham dan menurunnya peserta pada kategori kurang paham. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan workshop dan pendampingan dapat membantu mitra memahami konsep transformasi digital, manfaat sistem, serta penggunaan sistem dalam mendukung proses pengambilan keputusan prioritisasi potensi investasi. Kegiatan ini juga memberikan dasar bagi mitra untuk memanfaatkan sistem secara lebih optimal dalam mendukung proses kerja terkait pengelolaan informasi dan prioritas investasi.

Corresponding author email:
malahayati@polsri.ac.id

Copyright@ Author (2026). Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital pada sektor publik tidak lagi terbatas pada digitalisasi dokumen atau pemindahan proses manual ke media elektronik, tetapi telah berkembang menjadi perubahan pada proses kerja, pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan pola interaksi organisasi. Pada institusi pemerintahan daerah, transformasi tersebut membutuhkan penyesuaian pada aspek teknologi, proses organisasi, sumber daya manusia, dan budaya kerja. Redmann dan Rückel menjelaskan bahwa transformasi digital pada institusi publik merupakan perubahan yang mencakup organisasi, budaya, proses, dan teknologi sehingga keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan manusia dan organisasi [1].

Pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan juga semakin diarahkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Perubahan tersebut penting karena keputusan publik berhadapan dengan data yang beragam dan kebutuhan untuk menentukan alternatif berdasarkan sejumlah kriteria. Dalam konteks pemerintah daerah, kemampuan aparatur dalam memahami data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan menjadi salah satu kompetensi penting dalam penerapan digital government. Dingelstad, Borst, dan

Meijer mengidentifikasi data literacy, critical thinking, analytical skills, teamwork, domain expertise, dan kemampuan melibatkan pemangku kepentingan sebagai kompetensi yang diperlukan dalam data-driven decision-making pada pemerintah daerah [2]

Kebutuhan terhadap kemampuan tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan sistem digital tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat lunak. Transformasi digital perlu disertai proses transfer pengetahuan agar pengguna memahami fungsi, manfaat, alur kerja, serta cara mengoperasikan teknologi yang diterapkan. Pentingnya pengembangan keterampilan digital aparatur publik agar mampu memahami dan mengelola teknologi digital dalam konteks kebijakan dan pelayanan publik. Sementara itu, penelitian mengenai transformasi digital pemerintah menunjukkan bahwa organisasi publik dapat mengalami hambatan ketika perubahan teknologi tidak diikuti dengan perubahan pada proses dan praktik organisasi.

Dalam konteks pengelolaan potensi investasi daerah, kebutuhan terhadap dukungan pengambilan keputusan semakin penting karena proses prioritas dapat melibatkan sejumlah alternatif dan kriteria. Pendekatan sistem pendukung keputusan dapat membantu mengorganisasi informasi dan menghasilkan prioritas secara lebih sistematis. Penelitian mengenai decision support menunjukkan bahwa proses pemilihan alternatif dengan banyak kriteria merupakan persoalan yang kompleks sehingga membutuhkan kerangka pengambilan keputusan yang terstruktur [3]. Dengan dukungan sistem digital, informasi yang sebelumnya direkapitulasi dan dianalisis secara manual dapat diolah menjadi informasi yang lebih terstruktur untuk membantu pengguna dalam menentukan prioritas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuasin menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Berdasarkan identifikasi awal melalui instrumen kegiatan, peserta masih memiliki tingkat pemahaman yang beragam mengenai transformasi digital dalam pengambilan keputusan, sistem pendukung keputusan, proses penilaian potensi investasi yang berjalan secara manual, kriteria penilaian potensi investasi, serta manfaat sistem digital dalam menggantikan rekapitulasi manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem hasil penelitian perlu diikuti dengan kegiatan pendampingan agar teknologi yang dikembangkan dapat dipahami dan digunakan oleh mitra.

Kegiatan pengabdian ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian tim berupa pengembangan sistem pengambilan keputusan untuk membantu proses prioritas potensi investasi. Kegiatan difokuskan pada transfer pengetahuan dan pendampingan penggunaan sistem, bukan pada pengembangan perangkat lunak baru. Tim pengabdian yang terdiri atas dosen dan mahasiswa memberikan pemahaman mengenai konsep transformasi digital, fungsi sistem dalam mendukung pengambilan keputusan, manfaat sistem dibandingkan proses manual, serta praktik penggunaan sistem untuk memasukkan data dan melihat hasil perangkingan prioritas.

Metode pelaksanaan dilakukan melalui workshop dan pendampingan secara langsung kepada mitra. Keberhasilan kegiatan dievaluasi menggunakan pre-test dan post-test untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman peserta sebelum dan setelah pendampingan. Pendekatan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan juga banyak digunakan untuk melihat perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop [4], [5].

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui workshop yang dipadukan dengan penyampaian materi, demonstrasi, praktik langsung, dan pendampingan kepada mitra. Pendekatan tersebut digunakan agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan teknologi yang diterapkan. Pendekatan serupa diterapkan pada kegiatan pengabdian berbasis teknologi melalui tahapan pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi untuk memastikan teknologi dapat dimanfaatkan oleh mitra secara optimal [6].

2.1 Tahapan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan pendekatan workshop dan pendampingan yang melibatkan tim dosen, mahasiswa, dan aparatur DPMPTSP Kabupaten Banyuasin sebagai peserta. Tahapan kegiatan terdiri atas:

1) Identifikasi kondisi awal

Tahap pertama dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta terhadap transformasi digital dan sistem pengambilan keputusan. Identifikasi dilakukan melalui pre-test yang mencakup lima aspek, yaitu:

1. Pemahaman konsep transformasi digital dalam pengambilan keputusan;
2. Pemahaman mengenai Sistem Pendukung Keputusan (SPK);
3. Pemahaman mengenai proses penilaian potensi investasi yang berjalan secara manual;
4. Pemahaman terhadap kriteria penilaian potensi investasi;
5. Pemahaman terhadap manfaat sistem digital dalam menggantikan rekapitulasi manual.

2) Penyampaian materi

Tahap kedua berupa penyampaian materi mengenai transformasi digital dan pemanfaatan sistem pengambilan keputusan. Materi diarahkan pada konteks pekerjaan mitra sehingga peserta tidak hanya memahami konsep teknologi, tetapi juga hubungan antara sistem dengan proses prioritas potensi investasi.

3) Demonstrasi dan praktik penggunaan sistem

Tahap ketiga dilakukan melalui demonstrasi sistem oleh tim PKM yang dilanjutkan dengan praktik langsung oleh peserta. Materi praktik meliputi pengenalan antarmuka sistem, proses input data, proses pengolahan data, serta interpretasi hasil perangkingan prioritas investasi.

4) Evaluasi dan pendampingan

Tahap terakhir dilakukan melalui post-test untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan dilakuakn evaluasi langasung [7]. Evaluasi dilakukan dengan instrumen yang memiliki lima indikator pemahaman yang disesuaikan dengan materi pendampingan. Hasil pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan distribusi jawaban dan skor rata-rata.

2.2 Instrumen Pengukuran

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti workshop dan pendampingan. Pengukuran dilakukan melalui pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Penggunaan pre-test dan post-test dalam kegiatan pelatihan dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Pendekatan serupa diterapkan dalam kegiatan workshop berbasis teknologi yang menggunakan pre-test dan post-test sebagai bagian dari evaluasi kegiatan [8].

Instrumen terdiri atas lima indikator pemahaman pada masing-masing tahap pengukuran. Instrumen pre-test mengukur pemahaman awal peserta mengenai konsep transformasi digital, Sistem Pendukung Keputusan, proses penilaian potensi investasi yang berjalan secara manual, kriteria penilaian potensi investasi, serta manfaat sistem digital. Sementara itu, post-test mengukur pemahaman peserta setelah pendampingan mengenai transformasi digital, mekanisme sistem dalam menghasilkan prioritas investasi, manfaat sistem dibandingkan

proses manual, proses input data dan interpretasi hasil perangkingan, serta kemampuan mengoperasikan sistem secara mandiri.

Setiap indikator menggunakan tiga kategori respons, yaitu Kurang Paham, Cukup Paham, dan Paham, yang masing-masing diberikan skor 1, 2, dan 3. Karena respons menunjukkan tingkatan yang berurutan, data yang diperoleh dikategorikan sebagai data ordinal. Penggunaan rating scale untuk mengukur tingkat persepsi atau pemahaman perlu mempertimbangkan sifat ordinal dari kategori respons sehingga interpretasi hasil diarahkan pada distribusi kategori dan perubahan kecenderungan respons peserta.

Tabel 1. Perbandingan hasil pre-test dan post-test

Jawaban	Skor
Kurang Paham	1
Cukup Paham	2
Paham	3

Keterangan:

Nilai rata-rata dihitung menggunakan:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

dengan X_i merupakan skor jawaban peserta dan n merupakan jumlah responden.

Untuk melihat perubahan hasil pendampingan digunakan perbandingan:

$$\Delta X = \underline{X}_{post} - \underline{X}_{pre}$$

Sedangkan peningkatan relatif dihitung dengan:

$$P = \frac{\underline{X}_{post} - \underline{X}_{pre}}{\underline{X}_{pre}} \times 100\%$$

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Awal Peserta

Hasil pre-test menunjukkan bahwa peserta belum memiliki tingkat pemahaman yang seragam mengenai transformasi digital dan sistem pengambilan keputusan. Pada indikator transformasi digital, terdapat 3 peserta (37,5%) yang berada pada kategori kurang paham, 3 peserta (37,5%) cukup paham, dan 2 peserta (25%) paham.

Pada indikator pemahaman SPK, sebanyak 3 peserta (37,5%) berada pada kategori kurang paham dan 5 peserta (62,5%) cukup paham, sedangkan tidak terdapat peserta yang memilih kategori paham. Kondisi serupa terlihat pada pemahaman mengenai proses penilaian potensi investasi yang berjalan secara manual, dengan 4 peserta (50%) berada pada kategori kurang paham dan 4 peserta (50%) cukup paham.Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebelum pendampingan masih terdapat kebutuhan peningkatan pengetahuan mitra, khususnya mengenai konsep SPK, kriteria penilaian, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Dingelstad et al. yang menunjukkan bahwa penerapan data-driven decision-making pada pemerintah daerah membutuhkan kombinasi kemampuan teknis dan nonteknis, termasuk literasi data, kemampuan analitis, pengetahuan bidang, dan kemampuan bekerja sama [9].

3.2 Pelaksanaan Workshop dan Pendampingan

Workshop dilaksanakan dengan menggabungkan penyampaian materi, demonstrasi, dan praktik langsung. Pendekatan tersebut dipilih agar peserta memperoleh pemahaman konseptual [10], sekaligus pengalaman dalam menggunakan sistem.

Materi pertama diarahkan pada pemahaman transformasi digital dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya tim menjelaskan konsep sistem pengambilan keputusan dan keterkaitannya dengan proses prioritas potensi investasi. Pada tahap demonstrasi, tim memperlihatkan alur penggunaan sistem mulai dari penginputan data hingga diperolehnya hasil perangkingan.



Gambar 1. Workshop dan pendampingan

Pendampingan kemudian dilakukan melalui praktik langsung sehingga peserta tidak hanya melihat demonstrasi, tetapi mencoba menggunakan sistem. Pola workshop yang menggabungkan pemaparan materi dan praktik relevan dengan kegiatan peningkatan kompetensi digital karena proses adopsi teknologi membutuhkan pengetahuan dan kemampuan penggunaan secara langsung. Literatur mengenai transformasi digital sektor publik juga menegaskan bahwa transformasi tidak hanya menyangkut penerapan teknologi, tetapi mencakup perubahan proses dan praktik organisasi [11].

3.3 Perbandingan Pre-test dan Post-test

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti workshop dan pendampingan penggunaan sistem pengambilan keputusan prioritas potensi investasi. Pengukuran dilakukan dalam dua tahap, yaitu pre-test sebelum penyampaian materi dan pendampingan serta post-test setelah seluruh rangkaian workshop dan praktik penggunaan sistem selesai dilaksanakan. Kedua pengukuran tersebut digunakan untuk melihat perubahan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, khususnya terkait transformasi digital, sistem pengambilan keputusan, manfaat sistem, serta penggunaan sistem dalam proses prioritas potensi investasi.

Pelaksanaan pre-test dan post-test dilakukan kepada peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan. Dokumentasi pelaksanaan pengisian instrumen evaluasi ditampilkan pada Gambar 2. Dokumentasi tersebut menjadi bukti keterlaksanaan proses evaluasi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 2. Pelaksanaan evaluasi kegiatan

Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti workshop dan pendampingan. Pengukuran dilakukan melalui pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah kegiatan dengan lima indikator pemahaman yang berkaitan dengan transformasi digital dan penggunaan sistem pengambilan keputusan. Perbandingan hasil pre-test dan post-test peserta disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan hasil pre-test dan post-test

No	Indikator	Pre-test Kurang	Pre-test Cukup	Pre-test Paham	Post-test Cukup	Post-test Paham
1	Transformasi digital dalam pengambilan keputusan	37,5%	37,5%	25,0%	25,0%	75,0%
2	Cara kerja sistem menghasilkan prioritas investasi	37,5%	62,5%	0%	25,0%	75,0%
3	Manfaat sistem dibanding proses manual	50,0%	50,0%	0%	37,5%	62,5%
4	Input data dan melihat hasil perangkingan	37,5%	62,5%	0%	25,0%	75,0%
5	Pengoperasian sistem secara mandiri	37,5%	62,5%	0%	25,0%	75,0%
Rata-rata		40,0%	52,5%	7,5%	27,5%	

Tabel 2. menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti workshop dan pendampingan. Pada kondisi awal, rata-rata 40,0% jawaban berada pada kategori kurang paham, 52,5% cukup paham, dan hanya 7,5% berada pada kategori paham. Setelah kegiatan, tidak terdapat lagi jawaban pada kategori kurang paham. Proporsi jawaban pada kategori paham meningkat menjadi 72,5%, sedangkan 27,5% berada pada kategori cukup paham.

Perubahan paling besar terlihat pada indikator pemahaman terhadap cara kerja sistem, manfaat sistem, input data dan hasil perangkingan, serta kemampuan mengoperasikan sistem. Sebelum pendampingan, tidak terdapat peserta yang menyatakan paham pada indikator cara kerja sistem menghasilkan prioritas investasi, sedangkan setelah pendampingan sebanyak 75% peserta menyatakan paham.

Pada indikator manfaat sistem dibandingkan proses manual, proporsi peserta yang menyatakan paham meningkat dari 0% menjadi 62,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis terhadap penggunaan sistem, tetapi juga membantu peserta memahami nilai praktis sistem dalam mendukung pekerjaan mereka.

Secara keseluruhan, rata-rata skor deskriptif pemahaman meningkat dari 1,675 pada pre-test menjadi 2,725 pada post-test, atau mengalami perubahan sebesar 1,05 poin pada skala 1–3. Perubahan tersebut disertai dengan

pergeseran distribusi respons, yaitu kategori kurang paham yang semula sebesar 40,0% menjadi 0%, sedangkan kategori paham meningkat dari 7,5% menjadi 72,5%. Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti workshop dan pendampingan.

Temuan ini mendukung pentingnya peningkatan kompetensi digital sebagai bagian dari transformasi sektor publik. kemampuan digital aparatur bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga peningkatan kemampuan memahami konteks dan implikasi teknologi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan [12].

Hasil tersebut juga sejalan dengan studi mengenai pelatihan berbasis komunitas yang menunjukkan bahwa evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan pengetahuan peserta setelah memperoleh intervensi pembelajaran menjadi dan landasan bagi peningkatan kapasitas [13]. Pendampingan penggunaan teknologi secara langsung dapat meningkatkan pemahaman peserta sekaligus membantu peserta menghasilkan atau menerapkan produk berbasis teknologi [14]. Dengan demikian, kombinasi workshop, praktik langsung, dan pendampingan dalam kegiatan ini dapat dipandang sebagai mekanisme transfer pengetahuan untuk mendukung proses adopsi sistem hasil penelitian oleh mitra.

3.4 Dampak Kegiatan terhadap Mitra

Pelaksanaan workshop dan pendampingan memberikan perubahan pada pemahaman mitra dalam mengenali dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pengambilan keputusan prioritas potensi investasi. Perubahan tersebut terlihat dari hasil evaluasi pre-test dan post-test yang menunjukkan adanya pergeseran tingkat pemahaman peserta setelah memperoleh materi, demonstrasi, dan praktik penggunaan sistem. Dampak kegiatan tidak hanya ditinjau dari pemahaman terhadap konsep transformasi digital, tetapi juga dari kemampuan peserta memahami fungsi sistem dalam penggunaan teknologi secara efektif [15], manfaat penggunaan sistem dibandingkan proses manual, serta tahapan penggunaan sistem dalam memasukkan data dan memperoleh hasil perangkingan. Perbandingan kondisi mitra sebelum dan sesudah kegiatan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tabel 3. Perbandingan hasil pre-test dan post-test

Aspek	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Pemahaman transformasi digital	Sebagian peserta kurang memahami	75% menyatakan paham
Pemahaman SPK/sistem	Belum ada yang menyatakan paham	75% menyatakan paham
Pemahaman manfaat sistem	Belum ada yang menyatakan paham	62,5% menyatakan paham
Input dan melihat perangkingan	Belum diukur dalam pre-test secara operasional	75% menyatakan paham
Operasional sistem	Belum mendapatkan pendampingan	75% menyatakan paham

Berdasarkan Tabel 3. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa luaran kegiatan tidak hanya berupa penyampaian informasi mengenai teknologi, tetapi telah menghasilkan peningkatan pemahaman pengguna terhadap fungsi dan penggunaan sistem. Hal ini penting karena keberhasilan transformasi digital pada organisasi publik tidak cukup diukur dari tersedianya teknologi, tetapi juga dari kemampuan organisasi dan penggunanya dalam mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam proses kerja.



Gambar 3. Dokumetasi penutup bersama Mitra

3.5 Keunggulan dan Keterbatasan

Keunggulan kegiatan terletak pada penggunaan sistem yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian sehingga materi pendampingan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan mitra. Peserta memperoleh pemahaman konseptual sekaligus pengalaman menggunakan sistem melalui praktik langsung. Keterbatasan kegiatan adalah jumlah peserta yang relatif terbatas dan instrumen evaluasi menggunakan pengukuran berbasis persepsi pemahaman. Kemudian evaluasi dilakukan segera setelah pendampingan sehingga belum dapat menggambarkan keberlanjutan penggunaan sistem dalam jangka panjang. Peluang pengembangan diarahkan pada pendampingan lanjutan, pemanfaatan sistem dalam proses kerja rutin, pengembangan fitur pelaporan, serta evaluasi penggunaan sistem setelah mitra menggunakannya secara mandiri.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan transformasi digital pada DPMPTSP Kabupaten Banyuasin berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap pemanfaatan sistem pengambilan keputusan untuk mendukung prioritas potensi investasi. Hasil evaluasi terhadap 8 peserta dari DPMPTSP Kabupaten Banyuasin yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pengelolaan informasi investasi menunjukkan bahwa rata-rata skor pemahaman meningkat dari 1,675 pada pre-test menjadi 2,725 pada post-test, dengan peningkatan sebesar 1,05 poin atau 62,69%. Proporsi peserta yang berada pada kategori paham meningkat dari 7,5% menjadi 72,5%, sedangkan kategori kurang paham menurun dari 40,0% menjadi 0%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi workshop, demonstrasi, praktik langsung, dan pendampingan dapat membantu proses transfer pengetahuan dan meningkatkan kesiapan mitra dalam menggunakan sistem. Meskipun demikian, evaluasi masih terbatas pada perubahan pemahaman sesaat setelah kegiatan sehingga pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada evaluasi penggunaan sistem secara berkelanjutan dan integrasinya ke dalam proses kerja mitra.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Sriwijaya atas pendanaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Alamsyah, S.Pd., selaku Plt. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuasin, beserta seluruh jajaran dan peserta yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Apresiasi turut disampaikan kepada seluruh tim pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas dosen dan mahasiswa atas kontribusi dan kerja sama selama persiapan, pelaksanaan workshop, pendampingan, dan evaluasi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Redmann and D. Rückel, "Die digitale Transformation kommunaler Einrichtungen – Herausforderungen und Erfolgsfaktoren," HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, vol. 58, no. 5, pp. 978–990, Oct. 2021, doi: 10.1365/s40702-021-00779-z.

[2] J. Dingelstad, R. T. Borst, and A. Meijer, "Hybrid Data Competencies for Municipal Civil Servants: An Empirical Analysis of the Required Competencies for Data-Driven Decision-Making," Public Pers. Manage., vol. 51, no. 4, pp. 458–490, Dec. 2022, doi: 10.1177/00910260221111744.

[3] S. J. Eom and J. Lee, "Digital government transformation in turbulent times: Responses, challenges, and future direction," Apr. 01, 2022, Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.giq.2022.101690.

[4] J. Gangneux and S. Joss, "Crisis as driver of digital transformation? Scottish local governments' response to COVID-19," Data Policy, vol. 4, no. 1, Aug. 2022, doi: 10.1017/dap.2022.18.

[5] B. Moser-Plautz and L. Schmidthuber, "Digital government transformation as an organizational response to the COVID-19 pandemic," Gov. Inf. Q., vol. 40, no. 3, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.giq.2023.101815.

[6] M. Malahayati, A. S. Wati, N. Jumriatunnisah, L. Nardo, S. R. Rezeki, and M. I. Apriansyah, "Pemberdayaan Kelompok PKK Desa Parit melalui Smart Selling System untuk Meningkatkan Literasi Digital dan Akses Pasar Produk Pangan Olahan Ikan," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 4, no. 4, pp. 1061–1070, Oct. 2025, doi: 10.59025/bgye7n45.

[7] D. P. Rahmawati and D. N. Dwi Seputro, "Peningkatan Pemahaman Grooming Service Melalui Pelatihan Berbasis Pretest Dan Posttest Pada Karyawan Suweger Indonesia," Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), vol. 5, no. 2, pp. 456–462, Nov. 2025, doi: 10.36378/bhakti_nagori.v5i2.4587.

[8] M. Malahayati, T. Armiani, E. Nadeak, R. Sadariawati, and M. Noval, "Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran menggunakan Genially bagi Guru SMK Karya Andalas," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 4, no. 3, pp. 768–776, Aug. 2025, doi: 10.59025/4e1gn651.

[9] U. B. U. Roehl and M. B. Hansen, "Automated, administrative decision-making and good governance: Synergies, trade-offs, and limits," Public Adm. Rev., vol. 84, no. 6, pp. 1184–1199, Nov. 2024, doi: 10.1111/puar.13799.

[10] R. Novianti, E. Sulistyowati, and L. Aurora, "Digital Literacy Acceleration Workshop and Mentoring for MSMEs in Kedinding Urban Village, Surabaya," Jurnal Abmas Negeri (JAGRI), vol. 6, no. 1, pp. 166–176, Jun. 2025, doi: 10.36590/jagri.v6i1.1518.

[11] N. Heryana, R. Mayasari, A. Susilo, Y. Irawan, and B. Nugraha, "Abdimas Umtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM-Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Improving Digital Literacy Skills for Mekarbuana Village Officials." [Online]. Available: https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/5901

[12] E. Krisnanik, T. Rahayu, I. Hesti Indriana, and U. Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, "Pelatihan Penggunaan Simpokedes untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Aparatur Desa Sukamanah Serang," 2023. [Online]. Available: http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas

[13] P. Kepemimpinan, B. Komunitas, K. Taruna, J. Barat, E. Kusumawati, and D. Andiani, "Vol 5 (2) (2024) 21 - 40 Doi: Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat A B S T R A K í ½í´" O P E N A C C E S S," 2024.

[14] E. Nadeak, F. Elfaladonna, and M. Malahayati, "Pelatihan Pembuatan Modul Ajar Interaktif Bagi Guru dengan Menggunakan Canva (Studi Kasus: SDN 204 Palembang)," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 2, no. 3, pp. 201–206, Jul. 2023, doi: 10.59025/js.v2i3.103.

[15] R. Y. Maulana, D. Subekti, M. Yusuf, A. Berianysah, and D. S. Putra, "Penguatan Kapasitas Digital dalam Menghadapi Transformasi Digital untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa," Journal of Rural Community Development Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 01, no. 02, Oct. 2024, doi: 10.22437/jrcd.v1i2.13.